



Pemerintah
Kota Semarang

Masterpiece

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG
TAHUN 2025-2029**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kaidah penyusunan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang berisi upaya- upaya pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029 merupakan pengaplikasian Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan landasan hukum tersebut diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah harus memiliki rencana strategik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang periode 2021 - 2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini dapat dipergunakan untuk mendukung langkah- langkah mewujudkan Visi Kota Semarang yaitu **“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”**.

Semarang, September 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. Prof. Soedarto, SH No.116, Telepon/Faximile (024) 76402252

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
NOMOR :B/14.2/ 000.7.1/IV/ 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045;
- 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
- 15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
- 16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
- 17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi dengan anggota tim mengenai persiapan kegiatan tersebut;

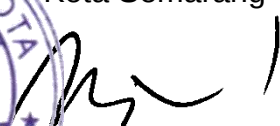
- Melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029

- KETIGA : Tim sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Semarang Tahun 2025
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 April 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang




NOEGROHO EDY RIJANTO

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang
Nomor : B/14.2/ 000.7.1/IV/ 2025
Tanggal : 30 April 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes.	Plt. Kepala	Penanggung Jawab
2	Asmara Dian Kusuma, S.E.	Perencana Ahli Muda	Ketua
3	Indraswari Widyastuti, SE.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Anak
4	Dra. Sih Wahyu Nurhastanti, M.M	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Koordinator Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
5	Sri Martini, S.Sos, M.A	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak
6	Sunardi, SE.,Kp. M.M	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi	Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi
7	Isti Wijaksari, S.E	Kasubbag Keuangan dan BMD	Anggota
8	Elisabeth Ika Retno Widiani, S.E	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Catur Karyanti, S.E,M.M.	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
10	Catur Ekawati, S.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
11	Asmara Dian Kusuma, S.E.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
12	Feri Alfaozan, S.E, M.M.	Sub Koordinator Pendidikan dan Kesehatan	Anggota
13	Drs. Bambang Teguh Murtiyono, M.M.	Sub Koordinator Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	Anggota

14	Rustiyanah Rachman, S.Sos., M.M.	Sub Koordinator Pengasuhan dan Lingkungan	Anggota
15	Drs. Akhmad Masrul Helmi	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Anggota
16	Ruhudini Nurchayati, S.H.	Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender	Anggota
17	Luky Widyastuti P, S.STP, M.Si.	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga	Anggota
18	Prahesti Eka Sari, S.E, M.M.	Sub Koordinator Perkembangan Kelurahan	Anggota
19	Amalia Sukma Yulianti, S.STP.	Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	Anggota
20	Herry Susanto, S.Kom.	Sub Koordinator Data dan Informasi	Anggota
21	Ata Nuridha, S.H.	Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak	Anggota
22	Amier Nur Khafid, S.M.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
23	Kartika Putra Pradida, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Anggota

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



NOEGROHO EDY RIJANTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I

KATA PENGANTAR..... II

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi8

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang22

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang38

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....46

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 48

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....48

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya51

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang63

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 66

3.1 Tujuan dan Sasaran 66

3.1.1 Tujuan.....66

3.1.2 Sasaran67

3.2 Strategi dan Kebijakan 70

3.2.1 Strategi.....70

3.2.2 Kebijakan72

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 74

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD 74

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 131

BAB V PENUTUP..... 134

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 2029;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan

4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator

kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- 2) perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;
- 3) pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- 4) penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- 5) penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- 6) penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- 7) penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak

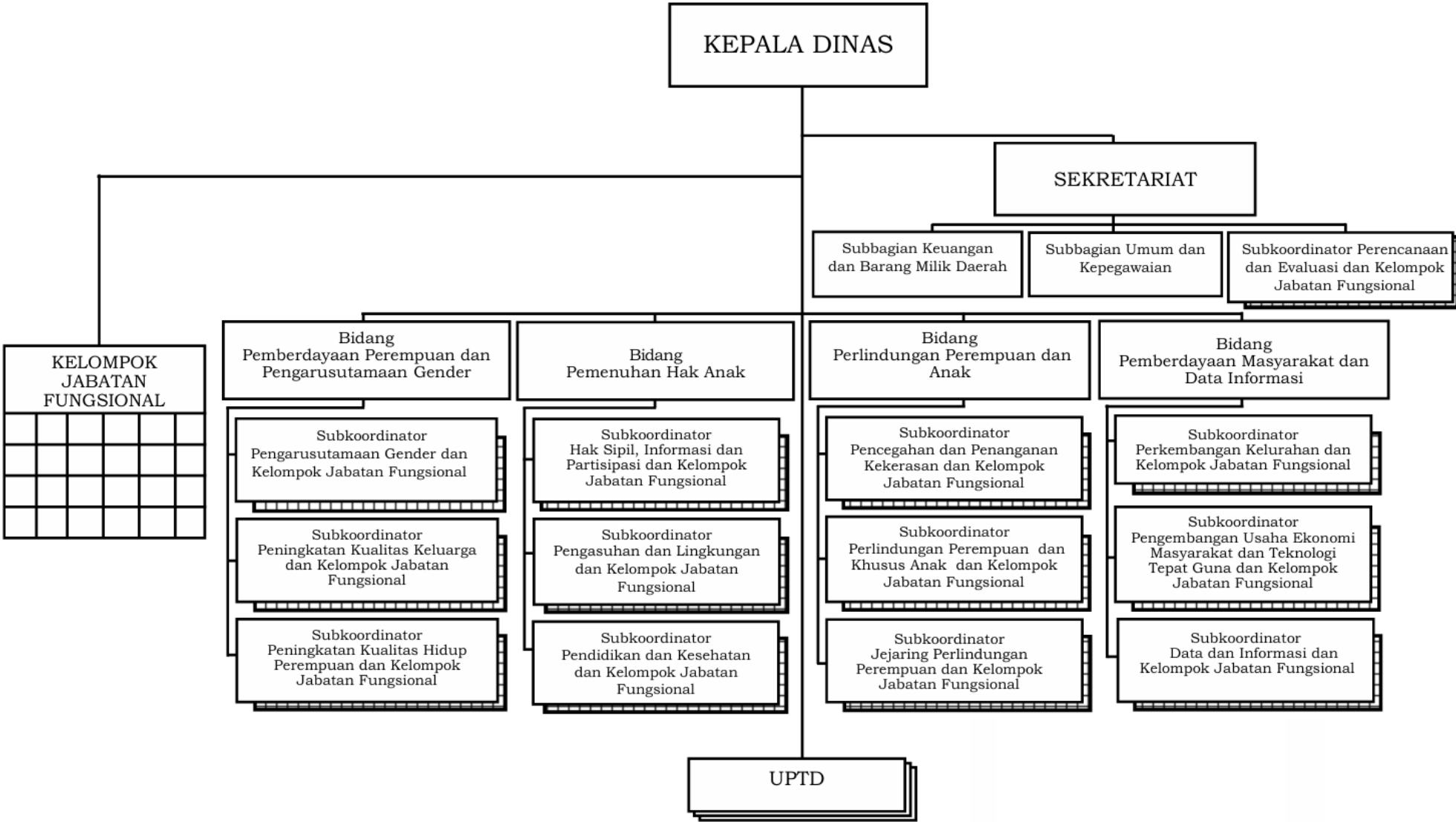
Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

- 8) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- 9) penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

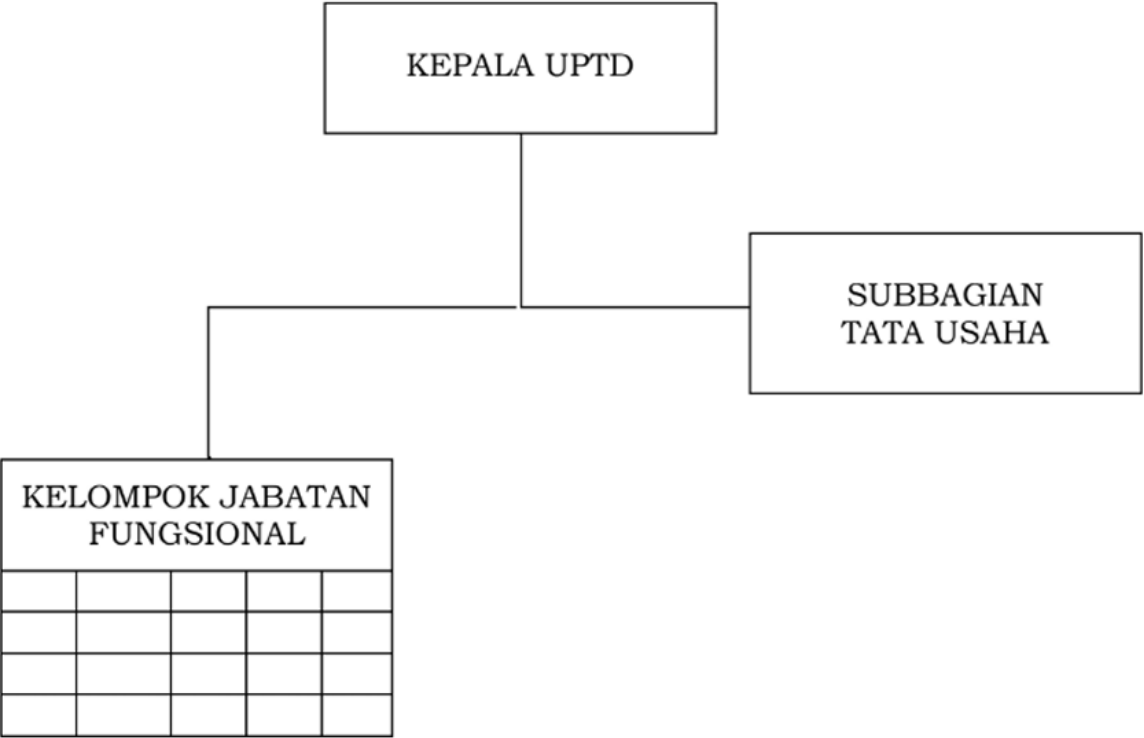
a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG



GAMBAR 2.2
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)



b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD. Sekretaris diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawab;
- c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- d. pelaksanaan fasilitasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi dan pihak terkait;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Kesekretariatan Dinas;
- g. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPTD;
- h. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- i. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
- k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
- l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
- m. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
- n. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- o. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
- p. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
- q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
- r. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;

- s. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
- t. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
- u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- v. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
- w. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
- x. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- z. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- e. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan, sosialisasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi lembaga berbasis gender antara lain Gabungan Organisasi Wanita, Dharma Wanita Persatuan, Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia dan organisasi perempuan lainnya;
- h. pelaksanaan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- i. pelaksanaan kegiatan pengukuran ketahanan keluarga;
- j. pelaksanaan kegiatan peringatan terkait peningkatan kualitas keluarga dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- k. pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan perempuan;
- l. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyedia layanan komprehensif pemberdayaan perempuan;
- m. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan dan Lingkungan, dan Pendidikan dan Kesehatan. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- e. pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi forum anak;
- g. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan bagi anak, antara lain anak penyandang disabilitas, psikososial, perlakuan salah, perilaku menyimpang dan kelompok minoritas;
- h. pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pendidikan, budaya, kreativitas dan kesehatan;
- i. pelaksanaan kegiatan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan dan Lingkungan dan Pendidikan dan Kesehatan;
- j. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemenuhan Hak Anak;

- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak dan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga;
- f. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan dan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan antara lain dalam ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang;
- h. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain dari kekerasan, radikalisme, pornografi, eksploitasi, dalam situasi darurat Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya, Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency

Syndrome, perlakuan salah dan penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang;

- i. pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak; pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat maupun lembaga lain;
 - j. pelaksanaan kegiatan kerja sama layanan rujukan dengan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - k. pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - l. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - m. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Perkembangan Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Data dan Informasi. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- e. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan;
- f. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan pemberdayaan masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat;
- i. pelaksanaan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan; pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana Perkembangan Kelurahan;
- j. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- l. pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan antara lain melalui TNI Manunggal Membangun Desa, Karya Bakti Gugur Gunung;
- m. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan profil kelurahan, profil anak dan profil gender;
- n. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kekerasan terhadap perempuan dan anak, swadaya masyarakat serta gender dan anak;
- o. pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;

- p. pelaksanaan kegiatan Perkembangan Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Data dan Informasi;
- q. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- s. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- u. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di Daerah. Tugas UPTD PPA meliputi:

- a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;

- i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;
- b. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD PPA;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD PPA;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD PPA;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan/sub kegiatan; dan mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- i. menyusun program kerja UPTD PPA;
- j. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- k. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- l. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- m. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam data kepegawaian per bulan Agustus tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Semarang Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Tenaga Alih Daya		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD					
2	SMP/Sederajat	1	-	-	-	1
3	SMA/Sederajat	6	5	-	2	13
4	Diploma 3/D3	4	3	-	-	7
5	Strata 1/S1	9	31	-	3	43
6	Strata 2/S2	7	7	-	1	15
TOTAL		27	46	-	6	79

Dari jumlah pegawai sebanyak 79 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN		6	6
2	Golongan II	3	3	6
3	Golongan III	10	22	32
4	Golongan IV	3	4	7
5	Golongan V	4	3	7
6	Golongan VII	2	-	2
7	Golongan IX	4	14	18

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Aset Tanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1835	2006	Jl. Prof Sudarto, SH No. 70 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik	Hak Pakai	18 Mei 2006	HP 9	Rumdin Ketua DPRD	Pembelian	5.326.900

Tabel 2.4
Gedung dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	180	Jl. Prof Sudarto, SH No. 70 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik		Tanah Milik Pemda	Pembelian	59.243.530

Tabel 2.5
Peralatan dan Mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
1	Meja ½ Biro	000004				1993	Pembelian	305,02
2	Rice Warmer	000001	Indesit			2003	Pembelian	5.000
3	Tabung Gas	000002-000004	Elpiji			2003	Pembelian	1.500
4	Meja ½ Biro	000008				2005	Pembelian	1.735,18
5	Lemari Es	000006				2007	Pembelian	8.250
6	Lemari Kayu	000002-000005				2008	Pembelian	39.160
7	Pompa Lainnya (dst)	000001	Sanyo	Buah		2009	Pembelian	1.080
8	Alat Pengolahan Lainnya	000001-000002				2009	Pembelian	1.925,12
9	Alat Reproduksi Lainnya	000001				2009	Pembelian	2.550
10	Lemari Besi/Metal	000001-000005	Hexo			2009	Pembelian	3.892,81
11	Filling Cabinet Besi	000001-000004	Brother			2009	Pembelian	3.587,96
12	Filling Cabinet Besi	000005	Daito			2009	Pembelian	3.000,31
13	Meja Kerja Kayu	000005				2009	Pembelian	3.064,58
14	Kursi Kayu	000004				2009	Pembelian	612
15	Meja Rapat	000001				2009	Pembelian	3.279,75
16	Meja Ketik	000001				2009	Pembelian	1.334,69
17	Lemari Es	000001	Panasonic			2009	Pembelian	2.295
18	Tabung Gas	000005		50 kg		2009	Pembelian	1.272
19	Meja Rapat Pejabat Lainnya	000001				2009	Pembelian	962,56
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000002-000001				2009	Pembelian	4.326,65
21	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	000001-000008				2009	Pembelian	3.127,30

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
22	Wireless Amplifier	000001				2009	Pembelian	971,10
23	PC Unit	000002	Acer			2009	Pembelian	9.913,24
24	Laptop	000001	Sony			2009	Pembelian	23.430
25	Laptop	000003	Ebonit			2009	Pembelian	10.228,65
26	Televisi	000012	LG	32"		2010	Pembelian	9.547,85
27	Kursi Tamu	000001	Sofa			2010	Pembelian	4.924,68
28	Laptop	000004	Toshiba L510			2010	Pembelian	11.100
29	Laptop	000006	Toshiba M900			2010	Pembelian	14.900
30	Komputer Unit Lainnya	000001	Sony-Vplex 70			2010	Pembelian	10.400
31	LCD Projector/Infocus	000001	Epson			2011	Pembelian	17.548,81
32	Sepeda Motor	000008-000009	Honda	110	Campuran	2012	Pembelian	13.780,18
33	Kursi Besi/Metal	000023-000024	Silver 3 Deret	680mm		2012	Pembelian	3.800
34	Kursi Putar	000004-000001	Atlanta			2012	Pembelian	6.559,46
35	Handy Cam	000002	Sony			2012	Pembelian	7.475
36	Digital Video Effect	000001	Canon EDS 1100			2012	Pembelian	4.770
37	Wireless Ampifier	000002	GTCO			2012	Pembelian	5.092,82
38	Meja Kerja	000007	Kitchen Zink			2012	Pembelian	1.715
39	PC Unit	000003	Rellion			2012	Pembelian	6.345,62
40	Laptop	000007	Toshiba L745			2012	Pembelian	10.249,15
41	Laptop	000008	Toshiba M840			2012	Pembelian	9.700
42	Lemari Kaca	000001	Brother			2013	Pembelian	3.975
43	Kursi Rapat	000002-000001				2013	Pembelian	1.670,24
44	AC Window	000001-000005	LG	2 PK		2013	Pembelian	31.680
45	Laptop	000001	Sony/Inove			2013	Pembelian	7.700
46	Station Wagon	000001	Toyota Innova	2500cc	Campuran	2014	Pembelian	125.000
47	KBM Penumpang Lainnya	000001	Toyota Avanza Veloz	1495cc		2014	Pembelian	196.990

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
48	Filling Cabinet Besi	000006-000008	Hexo			2014	Pembelian	2.400
49	Tempat Tidur Besi	000002-000004	Model No.2	180x120		2014	Pembelian	11.697,38
50	Meja Makan Besi	000001				2014	Pembelian	7.275
51	Sofa	000007				2014	Pembelian	6.250
52	Meubeleur Lainnya	000012-000014	Estima	180x200		2014	Pembelian	41.982,38
53	Meubeleur Lainnya	000015-000020	Selera	180x90		2014	Pembelian	3.525,24
54	AC Window	000006-000007	LG	2 PK		2014	Pembelian	9.370,23
55	AC Split	000001	Sharp	1 ½ PK		2014	Pembelian	4.732,38
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000002-000003				2014	Pembelian	2.568
57	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000003-000002	Tiger Kuning			2014	Pembelian	4.236,69
58	Camera Vertical	000001	Nikon			2014	Pembelian	9.967,01
59	Laptop	000010	Toshiba Satelite			2014	Pembelian	8.251
60	Water Treatment	000001-000003				2015	Pembelian	13.591,73
61	KBM Penumpang Lainnya	000002	Toyota Avanza Veloz	1329cc	Campuran	2015	Pembelian	197.810
62	Sepeda Motor	000010	Honda			2015	Pembelian	14.126
63	Kursi Besi/Metal	000019-000022				2015	Pembelian	7.907,59
64	Tempat Tidur Kayu	000001				2015	Pembelian	12,485,67
65	Sofa	000008-000009	Set 321			2015	Pembelian	25.491,57
66	Layar Film/Projector	000001	Epson			2015	Pembelian	5.900
67	Camera Digital	000001	Canon			2015	Pembelian	6.800
68	Notebook	000002	Asus			2015	Pembelian	7.700
69	Mobil Workshop	000001	Toyota	1781cc		2016	Pembelian	95.000

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
70	Sepeda Motor	000011-000012	Honda New Vario 125 CBS	125cc	Campuran	2016	Pembelian	17.094
71	Mobil Ambulance	000001	Daihatsu Luxio	1495cc		2016	Pembelian	226.150
72	LCD Projector/Infocus	000002	Lenovo			2016	Pembelian	2.000
73	AC Split	000013-000011	Daikin	2 PK		2016	Pembelian	49.419,75
74	AC Split	000015	Standing Floor	4 PK		2016	Pembelian	28.460
75	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000001				2016	Pembelian	5.538,23
76	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000032	Brother			2016	Pembelian	1.975
77	Facsimile	000001	Panasonic			2016	Pembelian	2.900
78	Genset	000001	Perkins	30 Kva		2016	Pembelian	163.550,57
79	PC Unit	000004	Lenovo			2016	Pembelian	6.000
80	Laptop	000011	Toshiba			2016	Pembelian	8.500
81	Printer	000003-000007	Epson L220			2016	Pembelian	9.438
82	Station Wagon	000002	Toyota Allnew Kijang Innova	2500cc	Solar	2017	Pembelian	386.647,02
83	Minibus	000002-000003	Toyota Rush	1498cc	Campuran	2017	Pembelian	248.563,02
84	Sepeda Motor	000013-000014	Honda Vario	125cc	Campuran	2017	Pembelian	18.921
85	Sepeda Motor	000015-000026	Honda AFX12U21C08		Campuran	2017	Pembelian	17.152
86	Lemari Besi/Metal	000006-000007				2017	Pembelian	10.454,11
87	Filling Cabinet Besi	000010-000009	Superior		Besi	2017	Pembelian	12.967,12
88	Filling Cabinet Besi	000012-000016	Lufo		Besi	2017	Pembelian	9.619,79
89	Alat Penyimpan Kantor Lainnya	000001	Datafile		Besi	2017	Pembelian	31.513,11
90	Papan Nama Instansi	000003				2017	Pembelian	20.454,87

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
91	Meja Rapat	000002-000004		80cm	Kayu	2017	Pembelian	20.033,39
92	Tempat Tidur Besi	000001	Anak		Kayu	2017	Pembelian	3.015,61
93	Kursi Tamu	000003-000001	Sofa			2017	Pembelian	18.089,63
94	Kursi Tamu	000002				2017	Pembelian	7.363,11
95	Kursi Biasa	000002-000001	Konseling			2017	Pembelian	1.256,50
96	Meubeleur Lainnya	000009-000011	Konseling			2017	Pembelian	3.819,77
97	Meubeleur Lainnya	000010				2017	Pembelian	7.488,76
98	AC Split	000016-000020	Panasonic	1 PK	Campuran	2017	Pembelian	9.046,83
99	AC Split	000017-000019	Panasonic	2 PK	Campuran	2017	Pembelian	14.474,92
100	AC Split	000018	Panasonic	1 PK	Campuran	2017	Pembelian	4.523,41
101	Televisi	000002	Samsung LED	32"		2017	Pembelian	3.769,51
102	Televisi	000005-000003	Samsung Smart TV LED	49"		2017	Pembelian	34.679,50
103	Camera Film	000002	Sony			2017	Pembelian	13.670,36
104	Camera Film	000003	Nikon			2017	Pembelian	12.464,52
105	Handy Cam	000003	Panasonic			2017	Pembelian	14.927,26
106	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000002		Kayu		2017	Pembelian	6.966,06
107	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001				2017	Pembelian	4.997,87
108	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000004-000003				2017	Pembelian	6.966,06
109	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000006-000010				2017	Pembelian	24.060,56
110	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000055-000054		Kayu		2017	Pembelian	3.015,61
111	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000001-000004				2017	Pembelian	4.002,17

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
112	Facsimile	000002	Panasonic		Fiber	2017	Pembelian	1.407,28
113	Mainframe (Komputer Jaringan)	000001	Server		Campuran	2017	Pembelian	67.851,19
114	PC Unit	000005	Lenovo			2017	Pembelian	5.034,38
115	PC Unit	000008	HP Slimline			2017	Pembelian	13.067,38
116	Laptop	000017-000021	Asus			2017	Pembelian	40.658,44
117	Laptop	000018-000016	Dell Inspiron			2017	Pembelian	44.932,57
118	Laptop	000019-000020	Dell Inspiron			2017	Pembelian	30.135,67
119	Printer	000008	Epson L386			2017	Pembelian	3.015,61
120	Printer	000009	Epson L385			2017	Pembelian	3.015,61
121	Printer	000011	Epson L360			2017	Pembelian	2.311,97
122	Printer	000012-000013	Epson L380			2017	Pembelian	8.413,55
123	Sofa	000001			Multiplex	2018	Pembelian	7.100
124	Sofa	000002			Campuran	2018	Pembelian	7.500
125	Kitchen Set	000002			Multiplex	2018	Pembelian	16.450
126	Televisi	000006	Panasonic			2018	Pembelian	1.550
127	Televisi	000007	Samsung	32"		2018	Pembelian	4.335
128	Loudspeaker	000001	JBL			2018	Pembelian	19.950
129	Dispenser	000003	Arista			2018	Pembelian	1.100
130	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001				2018	Pembelian	1.375
131	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000056-000057				2018	Pembelian	4.200
132	PC Unit	000009-000010	Asus			2018	Pembelian	24.150
133	Laptop	000023-000027	Dell			2018	Pembelian	72.280
134	Printer	000016	Epson			2018	Pembelian	3.600
135	Printer	000019-000018	Brother			2018	Pembelian	7.582

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
136	Lemari Es	000003	Sharp			2019	Pembelian	3.000
137	Televisi	000008	Samsung	43"		2019	Pembelian	6.334,80
138	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000063-000062	Hexo		Campuran	2019	Pembelian	6.664
139	PC Unit	000013-000014	HP			2019	Pembelian	28.027,80
140	Laptop	000031	Asus A507U			2019	Pembelian	7.941,80
141	Laptop	000032-000031	Asus Vivobook			2019	Pembelian	13.017
142	Laptop	000041	Dell Inspiron			2019	Pembelian	11.841,66
143	PC	000001	Lenovo			2020	Pembelian	14.800
144	Laptop	000033	Lenovo	14"		2020	Pembelian	6.702,80
145	Laptop	000034	Dell			2020	Pembelian	8.200
146	Notebook	000020-000022	Samsung Tablet Galaxy			2020	Pembelian	47.920
147	Printer	000021-000024	Canon			2020	Pembelian	13.150
148	Printer	000025	Canon Inkjet			2020	Pembelian	1.289,62
149	Filling Cabinet Besi	000018-000017			Besi dan Kaca	2021	Pembelian	7.000
150	LCD Projector/Infocus	000004	Epson			2021	Pembelian	7.330
151	Kursi Lipat	000011-000007	Chitose		Campuran	2021	Pembelian	15.000
152	Mesin Cuci	000001	LG	10,5 kg		2021	Pembelian	12.200
153	AC Split	000021	Panasonic	2 PK		2021	Pembelian	8.750
154	Audio Mixing Portable	000001	Mipro			2021	Pembelian	22.175
155	Handy Talkie	000001	Baofeng			2021	Pembelian	421,76
156	PC Unit	000015-000016	Dell			2021	Pembelian	48.800
157	Laptop	000035-000036	Dell			2021	Pembelian	34.120

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
158	Printer	000028-000026	Epson L3110			2021	Pembelian	11.300
159	CCTV	000002	Dahua			2022	Pembelian	4.399,28
160	LCD Projector/Infocus	000005	Epson			2022	Pembelian	10.631,57
161	Focusing Screen/Layar LCD Projector	000001-000002				2022	Pembelian	16.150
162	Kursi Besi/Metal	000003-000008	Elkana			2022	Pembelian	10.700,89
163	Meja ½ Biro	000016-000018				2022	Pembelian	3.876,12
164	Loudspeaker	000002	Auburn			2022	Pembelian	6.022,72
165	Camera Video	000001	Logitech Conference			2022	Pembelian	3.821,40
166	Camera Video	000002	Logitech			2022	Pembelian	413,58
167	Dispenser	000004	Sharp			2022	Pembelian	2.566,32
168	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000001				2022	Pembelian	3.894,69
169	Camera Electronic	000002-000001	Sony/Alpha			2022	Pembelian	71.603
170	Switcher	000001				2022	Pembelian	28.356,20
171	PC Unit	000017-000019	Asus			2022	Pembelian	43.121
172	Laptop	000037-000038	HP			2022	Pembelian	20.874,02
173	Notebook	000024	Asus			2022	Pembelian	10.200
174	Scanner	000002-000001	Epson			2022	Pembelian	10.502
175	Monitor	000001	LG			2022	Pembelian	1.150
176	Printer	000031-000032	Canon			2022	Pembelian	11.933
177	Tenda	000009-000013			Campuran	2022	Pembelian	23.243,40
178	Minibus	000004	Toyota Veloz	1496	Campuran	2023	Pembelian	298.000
179	Lemari Penyimpan	000001			Kayu	2023	Pembelian	4.700

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
180	Lemari Besi/Metal	000008	Krisbow		Campuran	2023	Pembelian	3.680
181	Lemari Kayu	000001			Kayu	2023	Hibah	7.500
182	Filling Cabinet Besi	000027-000031	Brother		Besi	2023	Pembelian	19.750
183	Alat Penghancur Kertas	000001			Campuran	2023	Pembelian	5.850
184	Meja Kerja Kayu	000006-000020			Kayu	2023	Pembelian	46.800
185	Kursi Rapat	000003-000014	Brother			2023	Hibah	6.960
186	Kursi Putar	000009-000028				2023	Pembelian	80.000
187	AC Split	000022-000025	Polytron	2PK		2023	Pembelian	35.200
188	Portable AC	000001	Gree	3PK		2023	Pembelian	18.230
189	Televisi	000009-000010	LG Smart TV			2023	Pembelian	96.500
190	Sound System	000001	Aubern			2023	Pembelian	6.500
191	Microphone	000001-000002				2023	Pembelian	3.850
192	Dispenser	000006-000007	Panasonic			2023	Pembelian	6.294
193	Dispenser	000008				2023	Pembelian	3.996
194	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000002				2023	Pembelian	6.200
195	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000012-000016				2023	Pembelian	22.500
196	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000069-000073				2023	Pembelian	11.940
197	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	000002	Chairman			2023	Hibah	1.500
198	Lensa Kamera	000001	Sony			2023	Pembelian	38.500
199	Lensa Kamera	000002	FE F4 Macro G			2023	Pembelian	25.439
200	Lensa Kamera	000003	E PZ F4 G			2023	Pembelian	15.000
201	Camera Digital	000002	Canon EOS			2023	Pembelian	29.475

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
202	Lampu Blitz Camera	000001	Sony Flash			2023	Pembelian	3.240
203	Handy Talkie	000002	Hytera			2023	Pembelian	6.701,48
204	PC Unit	000020-000029	Axioo Desktop			2023	Pembelian	104.600
205	PC Unit	000030-000037	Axioo AIO			2023	Pembelian	105.600
206	Laptop	000039	Axioo			2023	Pembelian	9.060
207	Laptop	000040	Advan			2023	Pembelian	8.169
208	Scanner	000003	Epson			2023	Pembelian	5.770
209	Printer	000033-000038	Epson			2023	Pembelian	28.278
210	Station Wagon	000003	Mitsubishi Xpander	1499		2024	Pembelian	279.900
211	Sepeda Motor	000134-000139	Yamaha Nmax	155			Pembelian	217.800
212	Rak-Rak Penyimpan	000001					Pembelian	7.900
213	Lemari Penyimpan	000002					Pembelian	5.000
214	Lemari Penyimpan	000003	Custom		Kayu		Pembelian	30.535
215	Rak Kayu	000001-000002			Kayu		Pembelian	7.600
216	Filling Cabinet Besi	000032-000034	Brother		Besi		Pembelian	14.199
217	Locker	000001	Brother		Besi		Pembelian	2.400
218	Alat Penyimpan Kantor Lainnya	000002					Pembelian	11.400
219	CCTV	000003					Pembelian	11.489
220	CCTV	000004	HK Vision				Pembelian	4.350
221	Meja Kerja Kayu	000021-000070			Kayu		Pembelian	200.304
222	Kursi Besi/Metal	000009-000018					Pembelian	23.040
223	Kursi Rapat	000015-000054	Chitose				Pembelian	28.800

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
224	Kursi Putar	000029-000037	Donati				Pembelian	30.040
225	Kursi Lipat	000021-000026					Pembelian	3.720
226	Sofa	000003-000006					Pembelian	43.960
227	Lemari Es	000004-000005	Polytron				Pembelian	12.750
228	AC Sentral	000001					Pembelian	12.000
229	AC Split	000026-000032	Panasonic	2PK			Pembelian	68.600
230	AC Split	000033-000034	Polytron	0,5PK			Pembelian	9.600
231	Kompor Gas	000001	Rinnai		Logam		Pembelian	900
232	Tabung Gas	000001	Bright		Logam		Pembelian	1.400
233	Televisi	000011	LG	65"			Pembelian	18.800
234	Sound System	000002					Pembelian	25.700
235	Dispenser	000009-000011	Panasonic				Pembelian	9.360
236	Tangga	000001			Logam		Pembelian	2.600
237	Bracket Standing Peralatan	000001			Logam		Pembelian	5.750
238	Meja Tamu Biasa	000001					Pembelian	4.000
239	Lemari Buku Arsip	000001	Custom				Pembelian	10.100
240	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	000001-000002	Optima				Pembelian	10.200
241	Audio Mixing	000002	Yamaha				Pembelian	4.100
242	Microphone	000001-000002					Pembelian	4.000
243	Utility Trolley	000001			Besi		Pembelian	6.610
244	Stabilezer UPS	000001-000020					Pembelian	33.600

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)
245	Tabung Breathing Aparatus	000001-000004	Tonata		Logam		Pembelian	5.000
246	Chest Freezer	000001					Pembelian	3.475
247	PC Unit	000038-000049	Acer				Pembelian	164.400
248	Laptop	000042-000043	Acer				Pembelian	25.200
249	Scanner	000004-000005	Epson				Pembelian	15.058
250	Monitor	000002	HK Vision				Hibah	1.275
251	Monitor	000003	HK Vision				Pembelian	1.275
252	Printer	000039-000042	Epson				Pembelian	20.000

Tabel 2.6
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Konstruksi	Luas Bangunan (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Kondisi	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil		300	Jl. Prof Sudarto, SH No. 116 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik	Baik	Tanah Milik Pemd	Pembelian	23.488,61
2	Jalan Kota	Betonisasi	160	Kel. Pakintelan RT.01/RW.03	Baik	Tanah Milik Pemd	Pembelian	161.395,15
3	Jalan Kota	Betonisasi	135	Kel. Bendan Dhuwur RT.04/RW.02	Baik	Tanah Milik Pemd	Pembelian	155.785,02
4	Jalan Kota	Betonisasi	73	Kel. Bendan Dhuwur RT.04/RW.02	Baik	Tanah Milik Pemd	Pembelian	75.444,26
5	Jalan Kota	Pavingisasi	680	Kel. Pakintelan RW.03	Baik	Tanah Milik Pemd	Pembelian	148.513,73

Tabel 2.7
Aset Lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Pencipta	Judul>Nama	Spesifikasi	Kondisi	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	Software	2017		CV. Irnata Jaya			Pembelian	22.355.688

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

a. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indikator Tujuan OPD																		
a	Persentase implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%			N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-
b	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Point			N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	70,59	71,8	71,36	71,36	-	-	114,5	110,6	107,6	-
c	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%			N/A	90	91	92	93	-	92,46	100	98,87	-	-	102,7	109,9	107,5	-
2	Indikator Sasaran OPD																		
a	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%			N/A	51,24	51,27	51,29	51,32	51,3	49,78	48,76	50,42	-	-	97,15	95,23	98,3	-
b	Persentase cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%			N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-
c	Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	%			N/A	28,25	42,37	56,49	84,74	2,25	33,89	42,37	100	-	-	120	100,2	177	-
d	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%			N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-
e	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point			N/A	701	8011	801	801	738,3	744,4	833,1	884,6	-	-				-
f	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%			N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-
g	Nilai SAKIP	Point			N/A	70,1	70,44	70,7	71	74,58	76,71	78,75	77,85	-	-	109,4	111,9	110,1	-
3	Indikator Kinerja Daerah																		
a	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%			-	-		-	-	17,14	59,38	48,89	48,90	-	-	-	-	-	-
b	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%			-	-		-	-	0,017	0,028	0,027	0,03	-	-	-	-	-	-
c	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%			-	-		-	-	18,78	25,46	25,08	25,78	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
d	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			-	-		-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
e	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point			-	-		-	-	73,64	73,93	73,86	78,71	-	-	-	-	-	-
f	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Point			-	-		-	-	N/A	70,59	71,80	71,36	-	-	-	-	-	-
g	Rasio KDRT	%			-	-		-	-	0,02	0,025	0,025	0,031	-	-	-	-	-	-

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.960.57 9.250	9.220.62 1.984	10.814.49 2.709	13.291.03 1.183	14.084.99 0.743,34	8.687.70 9.864	8.801.05 1.760	10.230.13 5.069	12.441.55 5.829		87,2%	95,4%	94,6%	93,6%		9,68%	13,05%
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.181.00 6.625	956.461. 200	1.188.188. 288	1.493.250. 884	764.036.7 27	959.129. 263	878.654. 816	1.103.859. 260	1.311.181. 168		81,2%	91,9%	92,9%	87,8%		-4,49%	12,01%
Program Perlindungan Perempuan	1.770.46 0.690	1.847.26 6.588	2.190.227. 619	2.709.814. 502	874.861.4 77	1.295.49 7.736	1.437.01 2.753	1.704.809. 670	2.267.479. 238		73,2%	77,8%	77,8%	83,7%		-5,27%	20,85%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.401.60 2.913	1.615.49 6.770	1.885.339. 165	2.541.698. 720	1.314.719. 130	1.145.39 2.625	1.403.54 0.832	1.709.495. 752	2.351.276. 116		81,7%	86,9%	90,7%	92,5%		4,63%	27,29%
Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	471.151. 847	163.399. 940	318.495.1 90	246.319.9 80	209.769.0 98	426.137. 405	159.078. 700	307.375.0 00	232.477.5 15		90,4%	97,3%	96,5%	94,4%		-1,98%	2,06%
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	569.087. 058	315.948. 200	3.466.273. 136	1.667.108. 926	1.264.596. 873	382.9998 50	279.055. 413	3.304.637. 648	1.468.090. 360		67,3%	88,3%	95,3%	88,1%		219,14%	333,84%
Program Perlindungan Khusus Anak	633.939. 886	529.047. 209	432.208.5 70	173.359.2 16	261.906.4 21	334.734. 600	342.133. 900	366.455.0 65	105.819.7 13		52,8%	64,7%	84,8%	61%		-10,92%	-20,60%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	-	509.807. 700	78.056.22 0	729.977.1 34	685.006.7 91	-	485.378. 880	70.708.50 0	704.930.9 50		-	95,2%	90,6%	96,6%		248,11%	405,76%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	1.380.99 6.941	1.703.349. 925	2.055.920. 151	3.348.687. 962,70	-	1.269.97 3.675	1.525.619. 802	1.927.627. 856		-	92%	89,6%	93,8%		35,64%	23,24%
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG	15.987.8 28.269	16.539.0 46.532	22.076.63 0.822	24.908.48 0.696	22.808.57 5.223,04	13.231.6 01.343	15.055.8 80.729	20.323.09 5.766	22.810.43 8.745		82,8 %	91%	92,1 %	91,6 %		10,33%	20,34%

- c. Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam Pemberian Pelayanan

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki beberapa mitra yang bersinergi bersama dalam melayani masyarakat diantaranya :

1. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang;
2. Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKKKG) Kota Semarang;
3. Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK PUSPA) Kota Semarang;
4. Forum Komunikasi Perempuan Mandiri, Tangguh dan Hebat (FORKOM PERMATA HEBAT) Kota Semarang;
5. Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang;
6. Gabungan Organisasi Pengurus TKI Kota Semarang;
7. Tim Penggerak PKK Kota Semarang;
8. Forum Posyandu Kota Semarang;
9. Forum Media Sayang Perempuan dan Anak (SAPA) Kota Semarang;
10. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Semarang;
11. Forum Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (GARPUPERAK) Kota Semarang;
12. Forum Anak Kota Semarang;
13. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Semarang;
14. Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak);
15. Forum LPMK Kota Semarang;
16. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Kota Semarang;

- d. Penghargaan yang Diraih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Adapun beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam kurun waktu dari tahun 2021-2024 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berhasil meraih Predikat **UTAMA** untuk Kota Semarang pada Kategori Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2021;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berhasil mempertahankan Predikat **NINDYA** untuk Kota Semarang yang ketiga kalinya pada Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi dan memfasilitasi Tim Penggerak PKK Kota Semarang berhasil mendapat Juara III Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi dan memfasilitasi Kelurahan Purwosari dalam Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meraih Juara III kategori Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2022;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berhasil meraih Predikat **UTAMA** untuk Kota Semarang pada Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berhasil meraih Predikat **MENTOR** untuk Kota Semarang pada Kategori Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendapatkan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) untuk Kota Semarang Tahun 2023;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi pemberian penghargaan unit yang telah mengikuti proses standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) yaitu

SMP N 21, SMP N 1, SMP N 2, SMP N 36, SMP N 33, SMP N 39, dan SMP IT PAPB Kota Semarang;

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendampingi dan memfasilitasi Kelurahan Pedalangan pada Lomba Pelaksana Posyandu Terbaik yang berhasil meraih Juara II Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi dan memfasilitasi Kelurahan Gedawang dalam Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meraih Juara Harapan I kategori Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2023.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2024;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi dan memfasilitasi Kelurahan Pudukpayung dalam Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meraih Juara I kategori Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2024;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendampingi dan memfasilitasi Kelurahan Pudukpayung dalam Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional yang berhasil meraih Juara III kategori Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2024

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;

2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
3. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender;
4. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
5. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual, bullying dan penipuan;
6. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif;
7. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah :

1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko

Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030;

4. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan setelah mempelajari serta memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu :

1. “Masih tingginya ketimpangan gender dalam pembangunan”

2. “Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan”

yang kemudian dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Rumusan Permasalahan
“Masih tingginya ketimpangan gender dalam pembangunan”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih kurangnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kualitas hidup keluarga	Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Belum optimalnya pengelolaan sistem data informasi gender dan anak
		Masih kurangnya upaya dalam perlindungan perempuan
2	Masih kurangnya kesejahteraan dan perlindungan anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak
		Masih kurangnya upaya dalam perlindungan khusus anak

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah;
- b. Masih kurangnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Belum optimalnya penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Masih kurangnya kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak;
- e. Belum optimalnya penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak;
- f. Belum optimalnya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- g. Belum optimalnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- h. Masih kurangnya penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- i. Masih kurangnya kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan;

- j. Masih kurangnya kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan;
- k. Masih kurangnya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- l. Belum optimalnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- m. Masih kurangnya fasilitasi lembaga layanan pemenuhan hak anak
- n. Belum optimalnya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak;
- o. Masih kurangnya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi;
- p. Masih kurangnya kegiatan penguatan dan pencegahan lembaga layanan AMPK;
- q. Masih kurangnya kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan AMPK.

Tabel 2.11
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih kurangnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
		Masih kurangnya kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan
2	Belum optimalnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Belum optimalnya kualitas kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat;
- c. Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kelurahan;

- d. Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
- e. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
- f. Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;

2.2.2 Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting. Periode RPJMN Tahun 2025-2029 sangat strategis sebagai fondasi awal untuk meneruskan kemajuan bangsa dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045. Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 meliputi (1) pendapatan Per kapita setara negara maju, (2) adalah kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan (5) intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, selain telah menetapkan visi, Presiden memberikan 8 (delapan) misi yang disebut sebagai Asta Cita sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025 2029 yang meliputi:

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai Visi dan Misi Presiden, dalam RPJMN 2024-2029 telah ditetapkan 17 program prioritas nasional yang meliputi:

1. Swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi Politik, hukum dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Memberantas kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Pelayanan kesehatan yang merata bagi rakyat;
8. Penguatan bidang pendidikan, sains, dan teknologi, juga digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Jaminan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja dan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah;

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Dari 17 Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2024-2029, masing-masing agenda dijabarkan kedalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung 2 (dua) Program Prioritas yaitu terkait Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas. Sedangkan Program Prioritas yang terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat adalah Memberantas Kemiskinan

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK,

meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.
- Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.
- Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.
- Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.
- Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.
- Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.
- Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Ketercapaian visi selama lima tahun dirumuskan dalam tujuan yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan arah capaian visi. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dari setiap pokok visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif, dirumuskan tujuan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing;
 - b. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat;
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian;
 - d. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif.
2. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif, dirumuskan tujuan Menurunnya kemiskinan secara inklusif.
3. Pada pokok visi Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat.
4. Pada pokok visi Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Humanis, dan Inklusif, dirumuskan tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat

Dari beberapa tujuan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, maka juga telah ditetapkan hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian dapat diwujudkan dengan Meningkatnya kesetaraan gender, melalui Indeks Pembangunan Gender.

Sedangkan untuk mewujudkan pembangunan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat dapat diwujudkan dengan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang, diukur melalui Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator Indeks Pembangunan Gender dan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

c. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu

“Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak”

Tujuan diatas dijabarkan menjadi beberapa sasaran strategis yaitu :

1. Memperkuat Pembangunan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak
2. Penguatan Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan
3. Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Bebas dari Kekerasan
4. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak
5. Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituangkan di bawah ini.

Tabel 2.12
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Perspektif Stakeholders	
	1. Memperkuat Pembangunan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	a. IPG b. IKG c. Prevalensi kekerasan thd. Perempuan d. Prevalensi kekerasan thd Anak
	Perspektif Customers	
	2. Penguatan Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan	K/L dan Pemda yg memperoleh PPE
	3. Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Bebas dari Kekerasan	Prevalansi Kekerasan thd Perempuan
	4. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
	5. Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya	a. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) b. Prevalensi kekerasan thd Anak

d. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Apabila dirumuskan, hasil telaah Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri yang mendasarkan pada RPJMN tahun 2025-2029 dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan faktor pendorongnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2029

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1. Menurunkan tingkat kemiskinan 2. Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	1. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang kurang memadai 2. Belum optimalnya pengelolaan data dan Informasi Kependudukan 3. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat	Faktor Penghambat: 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
4. Transformasi sektor publik sebagai pengungkit	desa dalam mendukung perekonomian desa; 4. Belum Semua Kabupaten menyusun regulasi tentang pengembangan kawasan perdesaan untuk pengembangan ekonomi lokal. 5. Aksesibilitas di Desa yang terbatas 6. Kompetensi SDM aparatur desa yang masih lemah 7. Infrastruktur pendukung Pemerintahan Desa yang kurang memadai 8. Masih belum meratanya akses layanan dasar di Desa 9. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	3. Belum seluruh Kabupaten menetapkan kawasan perdesaan; 4. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. 5. Belum adanya <i>baseline</i> data klasifikasi pasar desa di masing-masing kabupaten. Faktor Pendorong: 1. Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa; 2. Dukungan pendampingan anggaran; 3. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; 4. Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa 5. Peran perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (non-government organisation/NGO) dalam peningkatan kapasitas, pendampingan, dan pengawasan pembangunan di Desa

- e. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang mendukung Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Meningkatnya Keluarga Berkualitas;
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pencegahan dan Layanan Kekerasan terhadap Perempuan;
 2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak;
 3. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak;
 4. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Bidang Pembangunan
 5. Terkendalinya Jumlah Penduduk;
 6. Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 7. Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.
- f. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang mendukung Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Meningkatkan Desa Mandiri.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
3. Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah;
4. Peningkatan Kemandirian Desa di Jawa Tengah

g. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak memiliki indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen RTRW Kota Semarang.

h. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap

lingkungan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah terkait belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender

Tabel 2.14
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Belum optimalnya distribusi kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	1. Masih kurangnya kesetaraan gender
	2. Masih kurangnya perlindungan terhadap anak dan perempuan

Tabel 2.15
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Semarang Tahun 2025-2029
Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan								
1	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	12	12	13	13	14	Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Mendorong komitmen dari seluruh stakeholder dalam mengevaluasi kebijakan responsif gender agar lebih maksimal
2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan	0,045%	0,044%	0,043%	0,042%	0,041%	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
	pasangan dalam 12 bulan terakhir.							kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan
3	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,014%	0,014%	0,013%	0,013%	0,012%		Memaksimalkan sosialisasi mengenai kekerasan seksual di masyarakat
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	20%	20%	20%	20%	20%	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20%, dan DPRD Kabupaten/kota menjadi 17%.	Mendorong Partai politik dapat menerapkan aturan internal agar 30% perempuan dapat menempati kepengurusan partai
5	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	48,75%	48,80%	48,85%	48,90%	48,95%	Meningkatnya indeks perberdayaan Gender (IDG)	Mendorong Pemerintah Daerah dalam program jenjang karir untuk perempuan pengambil keputusan
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara								
1	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	245	245	240	240	240	Terbitnya rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban	Sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan serta penyampaian informasi hak korban
Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
1	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	0,010%	0,009%	0,008%	0,007%	0,006%		Sosialisasi mengenai parenting dan hak hak anak dalam rumah tangga
2	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	0,060%	0,059%	0,058%	0,057%	0,056%	Menurunnya prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan	Sosialisasi tentang perlindungan diri dan batas-batas perilaku yang tidak pantas terhadap anak

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029		
							sepanjang hidupnya	
3	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%		Sosialisasi untuk peningkatan literasi masyarakat mengenai modus perdagangan orang
4	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0,005%	0,004%	0,004%	0,003%	0,002%		Sosialisasi mengenai kekerasan seksual dan batasan area tubuh pribadi
5	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	20%	20%	20%	20%	20%	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20%, dan DPRD Kabupaten/kota menjadi 17%.	Mendorong Partai politik dapat menerapkan aturan internal agar 30% perempuan dapat menempati kepengurusan partai
6	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	24%	24%	24%	25%	25%		Mendorong Pemerintah Daerah dalam program jenjang karir untuk pelatihan kepemimpinan perempuan
7	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	245	245	240	240	240	Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	Sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan serta penyampaian informasi hak korban

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.16
Isu Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Masih kurangnya kesetaraan gender	a. Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender; b. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah; c. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga					
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Belum optimalnya pengelolaan sistem data informasi gender dan anak					
Program Perlindungan Perempuan	Masih kurangnya upaya dalam perlindungan perempuan	Masih kurangnya perlindungan terhadap perempuan	Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Bebas dari Kekerasan	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama semua pihak, baik secara vertikal maupun horizontal oleh berbagai unit/lembaga layanan, sehingga perempuan korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya belum dapat tertangani secara baik dan optimal

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Program Pemenuhan Hak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	Masih kurangnya perlindungan terhadap anak	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	a. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak; b. Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Belum optimalnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Masih kurangnya upaya dalam perlindungan khusus anak					
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Masih kurangnya kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan	Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	Pengentasan kemiskinan	Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Belum optimalnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan masih lemahnya jejaring pengembangan ekonomi masyarakat
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada Visi dan Misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Semarang telah mengetahui apa yang

harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Ketimpangan Gender dalam Pembangunan; dan
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.

Adapun untuk tujuan diatas memiliki indikator yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG);

Indikator tujuan diatas diukur menggunakan 3 (tiga) aspek pembangunan yaitu kesehatan reproduksi; pemberdayaan; dan pasar tenaga kerja yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

2. Nilai Keselarasan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota yang Mendukung Pembangunan

Indikator tujuan diatas diukur menggunakan 8 (delapan) unsur pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yaitu unsur sosial; unsur kesehatan; unsur lingkungan hidup; unsur pemenuhan infrastruktur; unsur ekonomi; unsur koordinasi dan kolaborasi; unsur partisipasi dan peran aktif; unsur efektifitas dan hasil kinerja.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta kualitas hidup keluarga;
2. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
3. Meningkatnya lembaga kemasyarakatan berkualitas.

4. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah

Adapun untuk sasaran diatas memiliki indikator yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator sasaran diatas diukur menggunakan 3 dimensi penyusun yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Nilai IDG dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indikator sasaran diatas diukur dengan proyeksi nilai bobot bagi Kabupaten/Kota dan tiap kab/kota untuk menyiapkan semua dokumen pelengkap disetiap klaster yang diintervensi. Klaster yang akan menjadi penilaian dari IPA ada 5 diantaranya : klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan luang dan kegiatan budaya, klaster perlindungan khusus. Nilai IPA dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS);

3. Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota

Indikator sasaran diatas diukur dengan Persentase pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan ditambah Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas;

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

Indikator sasaran diatas diukur dengan penilaian AKIP Perangkat Daerah diambil dari angka yang dikeluarkan oleh Inspektorat;

5. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Indikator sasaran diatas diukur dengan penilaian dari AsikMas milik Bagian Organisasi.

Untuk penjabaran rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kesetaraan gender	Menurunnya Ketimpangan Gender dalam Pembangunan		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,135	0,13	0,125	0,12	0,115	0,11	
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta kualitas hidup keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	78,71	78,71	78,71	78,72	78,72	78,72	
		Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,37	71,38	71,39	71,40	71,41	71,42	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah - seharusnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	77,85	77,85	77,90	77,95	78,00	78,05	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah - seharusnya Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	90,46	90,46	90,47	90,48	90,49	90,5	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan		Nilai Keselarasan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota yang Mendukung Pembangunan	Angka	4,20	4,20	4,33	4,53	4,60	4,65	
		Meningkatnya lembaga kemasyarakatan berkualitas	Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	Angka	100	100	100	100	100	100	

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Pengembangan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Penguatan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Percepatan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Perwujudan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Pengembangan optimalisasi kualitas pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	Peningkatan optimalisasi kualitas pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	Penguatan optimalisasi kualitas pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	Percepatan optimalisasi kualitas pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga	Perwujudan optimalisasi kualitas pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga
Pengembangan optimalisasi pengelolaan sistem data informasi gender dan anak	Peningkatan optimalisasi pengelolaan sistem data informasi gender dan anak	Penguatan optimalisasi pengelolaan sistem data informasi gender dan anak	Percepatan optimalisasi pengelolaan sistem data informasi gender dan anak	Perwujudan optimalisasi pengelolaan sistem data informasi gender dan anak
Pengembangan optimalisasi kualitas dalam perlindungan perempuan	Peningkatan optimalisasi kualitas dalam perlindungan perempuan	Penguatan optimalisasi kualitas dalam perlindungan perempuan	Percepatan optimalisasi kualitas dalam perlindungan perempuan	Perwujudan optimalisasi kualitas dalam perlindungan perempuan
Pengembangan optimalisasi pemenuhan hak anak	Peningkatan optimalisasi pemenuhan hak anak	Penguatan optimalisasi pemenuhan hak anak	Percepatan optimalisasi pemenuhan hak anak	Perwujudan optimalisasi pemenuhan hak anak
Pengembangan optimalisasi upaya dalam perlindungan khusus anak	Peningkatan optimalisasi upaya dalam perlindungan khusus anak	Penguatan optimalisasi upaya dalam perlindungan khusus anak	Percepatan optimalisasi upaya dalam perlindungan khusus anak	Perwujudan optimalisasi upaya dalam perlindungan khusus anak
Pengembangan optimalisasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat	Penguatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat	Percepatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat	Perwujudan optimalisasi pemberdayaan masyarakat
Pengembangan optimalisasi kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan	Peningkatan optimalisasi kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan	Penguatan optimalisasi kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan	Percepatan optimalisasi kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan	Perwujudan optimalisasi kualitas administrasi pemerintahan pada Kelurahan
Pengembangan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Peningkatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Penguatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Percepatan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Perwujudan optimalisasi kualitas pelayanan internal dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Tabel 3.3
Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	Meningkatnya kesetaraan gender	Peningkatan kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	Peningkatan kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah
			Peningkatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
			Optimalisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
			Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
			Optimalisasi penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
			Optimalisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data
			Optimalisasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap
			Peningkatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan
			Penambahan jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan

			Penambahan jumlah kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan
			Peningkatan kegiatan untuk pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
			Optimalisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
			Peningkatan fasilitasi lembaga layanan pemenuhan hak anak
			Optimalisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak
			Peningkatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi
			Penambahan jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan lembaga layanan AMPK
			Penambahan jumlah kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan AMPK
			Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
			Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
			Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Peningkatan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
			Optimalisasi pengembangan ekonomi masyarakat
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kelurahan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
Meningkatnya kesetaraan gender					Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Kepala Dinas
	Menurunnya Ketimpangan Gender dalam Pembangunan				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Kepala Dinas
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta kualitas hidup keluarga			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Kepala Dinas
			Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender		Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
				Meningkatnya kegiatan kelembagaan PUG	Jumlah kegiatan pelebagaan PUG	2.08.02.01 Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2.08.02.2.01.0010 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0012 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	2.08.02.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender
					Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Bertambahnya lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2.08.02.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender
					Jumlah lembaga penyedia layanan	2.08.02.2.03.0007 Pendampingan Penguatan dan Pengembangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
				Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten /Kota	
				Bertambahnya layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi	2.08.03.2.02.0003 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0004 Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0005 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0006 Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0007 Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
				Meningkatnya kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan		Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.03.2.03.0007 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
			Meningkatnya ketahanan keluarga		Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
					Persentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)		
				Meningkatnya kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga
					Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0007 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Bertambahnya layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0004 Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0005 Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0006 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem data gender dan anak yang akuntabel		Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi
				Meningkatnya kegiatan untuk penyajian data gender dan anak	Jumlah kegiatan penyajian data gender dan anak	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Data dan Informasi
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	2.08.05.2.01.0004 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
		Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak			Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Kepala Dinas
			Meningkatnya akses pemenuhan hak-hak anak		Nilai Pemenuhan Hak Anak	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				Meningkatnya kegiatan pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	2.08.06.2.01 Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pendidikan dan Kesehatan
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Meningkatnya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pendidikan dan Kesehatan
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Menurunnya kekerasan terhadap anak		Nilai Perlindungan Khusus Anak	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
				Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Bertambahnya layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau	2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota		
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0009 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0010 Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0011 Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0012 Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0014 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
				Meningkatnya kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga	2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kepala Dinas
					Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kepala Dinas
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas	2.08.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Semarang yang sesuai peraturan perundangan		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.08.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.08.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.08.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sesuai ketentuan	2.08.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Kepala Dinas
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				Nilai Keselarasan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota yang Mendukung Pembangunan		Kepala Dinas

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
		Meningkatnya lembaga kemasyarakatan berkualitas			Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota		Kepala Dinas
			Meningkatnya kualitas proses administrasi kelurahan		Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi
				Meningkatnya kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Sub Koordinator Perkembangan Kelurahan
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan		Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
				Meningkatnya kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Perkembangan Kelurahan
				Meningkatnya kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat		Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggungjawab
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah Bentuk dukungan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
 Walikota Semarang
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
 Tahun 2025-2029

No	Program Proritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten /Kota	Rencana aksi : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
			2.08.03.2.02.0003 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
			2.08.03.2.02.0004 Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.02.0005 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.02.0006 Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.02.0007 Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan
			2.08.03.2.03.0007 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
			2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban perempuan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pencegahan kekerasan terhadap anak
			2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0009 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0010 Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0011 Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0012 Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.02.0014 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
			2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Rencana aksi : Pencegahan kekerasan terhadap anak
			2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Rencana aksi : Penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak
2	Optimalisasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rencana aksi : Penyelenggaraan PUG
			2.08.02.2.01.0012 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penyelenggaraan PUG
			2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	Rencana aksi : Pemberdayaan perempuan dan fasilitasi lembaga

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	pemberdayaan perempuan
			2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pemberdayaan perempuan dan fasilitasi lembaga pemberdayaan perempuan
			2.08.02.2.03.0007 Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pemberdayaan perempuan dan fasilitasi lembaga pemberdayaan perempuan
			2.08.04.2.01.0007 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan	Rencana aksi : Implementasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA)
			2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
			2.08.04.2.03.0004 Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
			2.08.04.2.03.0005 Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
			2.08.04.2.03.0006 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
3	Penyelenggaraan Kongres Perempuan	Meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai bidang	2.08.02.2.01.0010 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Fasilitasi pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia
4	Penyelenggaraan Konferensi Anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Advokasi lembaga Jejaring Pemenuhan Hak Anak
			2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penunjang Kota Layak Anak
			2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Pelatihan Konvensi Hak Anak

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Penguatan Lembaga Informasi Layak Anak
			2.08.06.2.02.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Evaluasi Sekolah Ramah Anak
			2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana aksi : Fasiltasi Daycare Anak

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terdapat pada lampiran tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG			Rp. 25.304.642.526		Rp. 27.981.762.998		Rp. 29.146.970.439		Rp. 29.361.002.488		Rp. 29.865.859.768	
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			21.617.108.610		23.904.104.127		24.899.511.028		25.082.353.131		25.513.639.787	
2.08.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas	100%	100%	11.172.837.357	100%	11.748.093.019	100%	12.334.747.669	100%	12.985.735.052	100%	13.597.521.808
2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Tersedianya acuan pelaksanaan phrogram, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	35.845.220	100%	37.929.742	100%	39.076.229	100%	75.280.041	100%	41.544.043
2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	15.000.000	4 Dok	15.000.000	4 Dok	15.000.000	4 Dok	50.000.000	5 Dok	15.000.000
2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	3.617.900	1 Dok	3.979.690	1 Dok	4.178.675	1 Dok	4.387.608	1 Dok	4.606.989

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	4.118.400	1 Dok	4.530.240	1 Dok	4.756.752	1 Dok	4.994.590	1 Dok	5.244.319
2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	2.783.000	2 Dok	3.061.300	2 Dok	3.214.365	2 Dok	3.375.083	2 Dok	3.543.837
2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD												
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.783.000	1 Dok	3.061.300	1 Dok	3.214.365	1 Dok	3.375.083	1 Dok	3.543.837
2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	6 Lap	4.698.320	6 Lap	5.168.152	6 Lap	5.426.560	6 Lap	5.697.888	6 Lap	5.982.782
2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap	12 Lap	1.844.600	12 Lap	2.129.060	12 Lap	2.285.513	12 Lap	2.449.789	12 Lap	2.622.278
2.08.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah												
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	N/A	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	11.136.992.136	100%	11.710.163.279	100%	12.295.671.443	100%	12.910.455.015	100%	13.555.977.765
2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang	72 Orang	10.810.561.416	72 Orang	11.351.089.487	72 Orang	11.918.643.961	72 Orang	12.514.576.159	72 Orang	13.140.304.967
2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	320.082.400	1 Dok	352.090.640	1 Dok	369.695.172	1 Dok	388.179.931	1 Dok	407.588.927
2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	2 Lap	1.483.680	2 Lap	1.632.048	2 Lap	1.713.650	2 Lap	1.799.333	2 Lap	1.889.300
2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	1.650.000	1 Dok	1.815.000	1 Dok	1.905.750	1 Dok	2.001.038	1 Dok	2.101.089
2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Lap	12 Lap	2.225.520	12 Lap	2.448.072	12 Lap	2.570.476	12 Lap	2.698.999	12 Lap	2.833.949

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	989.120	1 Dok	1.088.032	1 Dok	1.142.434	1 Dok	1.199.555	1 Dok	1.259.533
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	100%	4.406.808.253	100%	5.597.311.258	100%	5.779.196.971	100%	5.269.379.532	100%	4.990.583.438
2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	100%	100%	387.478.036	100%	426.225.840	100%	447.537.132	100%	469.913.988	100%	493.409.688
2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000
2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dok	2 Dok	196.628.036	2 Dok	216.290.840	2 Dok	227.105.382	2 Dok	238.460.651	2 Dok	250.383.683
2.08.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	360 Orang	250 Orang	40.850.000	250 Orang	59.935.000	250 Orang	70.431.750	250 Orang	81.453.338	250 Orang	93.026.004
2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	100%	100%	1.418.781.606	100%	1.560.659.767	100%	1.638.692.755	100%	1.720.627.393	100%	1.455.535.182
2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.699.945	1 Paket	8.469.940	1 Paket	8.893.436	1 Paket	9.338.108	1 Paket	9.805.014
2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	233.941.268	2 Paket	257.335.395	2 Paket	270.202.165	2 Paket	283.712.273	2 Paket	297.897.886
2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	41.383.375	2 Paket	45.521.713	2 Paket	47.797.798	2 Paket	50.187.688	2 Paket	52.697.072
2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	71.268.868	4 Paket	78.395.755	4 Paket	82.315.543	4 Paket	86.431.320	4 Paket	90.752.886
2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	29.402.919	3 Paket	32.343.210	3 Paket	33.960.371	3 Paket	35.658.390	3 Paket	37.441.309
2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu												
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	78.518.550	12 Lap	86.370.405	12 Lap	90.688.925	12 Lap	95.223.372	12 Lap	99.984.540

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Lap	20 Lap	583.970.974	20 Lap	642.368.072	20 Lap	674.486.475	20 Lap	708.210.799	20 Lap	666.956.475
2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dok	3 Dok	372.595.707	3 Dok	409.855.278	4 Dok	430.348.042	4 Dok	451.865.444	5 Dok	200.000.000
2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	100%	100%	423.211.359	100%	1.215.354.672	100%	1.178.142.556	100%	438.272.395	100%	269.044.528
2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	5 Unit	211.928.833	10 Unit	982.943.893	8 Unit	934.111.238	4 Unit	182.039.511	-	-
2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel												
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	87.753.534	5 Paket	96.528.887	5 Paket	101.355.332	5 Paket	106.423.098	5 Paket	111.744.253
2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	107.429.722	5 Paket	118.172.695	5 Paket	124.081.329	5 Paket	130.285.396	5 Paket	136.799.666
2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	16.099.270	2 Unit	17.709.197	2 Unit	18.594.657	2 Unit	19.524.390	2 Unit	20.500.609

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	1.224.253.668	100%	1.346.679.035	100%	1.414.012.987	100%	1.484.713.636	100%	1.558.949.318
2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	48 Lap	354.107.160	48 Lap	389.517.876	48 Lap	408.993.770	48 Lap	429.443.458	48 Lap	450.915.631
2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	870.146.508	12 Lap	957.161.159	12 Lap	1.005.019.217	12 Lap	1.055.270.178	12 Lap	1.108.033.686
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sesuai ketentuan	100%	100%	953.083.584	100%	1.048.391.943	100%	1.100.811.540	100%	1.155.852.117	100%	1.213.644.723
2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	48.355.999	1 Unit	53.191.599	1 Unit	55.851.179	1 Unit	58.643.738	1 Unit	61.575.925
2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	32 Unit	521.839.966	37 Unit	574.023.962	40 Unit	602.725.161	40 Unit	632.861.419	42 Unit	664.504.490
2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	65.167.565	10 Unit	71.684.322	10 Unit	75.268.538	10 Unit	79.031.965	10 Unit	82.983.563
2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	266.014.100	3 Unit	292.615.510	3 Unit	307.246.286	3 Unit	322.608.600	3 Unit	338.739.030
2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	51.705.954	6 Unit	56.876.550	6 Unit	59.720.377	6 Unit	62.706.396	6 Unit	65.841.716
2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan												
Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	48,89%	68,63%	1.380.912.301	68,78%	1.527.006.781	68,93%	1.590.593.899	69,08%	1.602.273.949	69,23%	1.629.824.768
2.08.02.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan kelembagaan PUG	Jumlah kegiatan pelembagaan PUG	N/A	5 Kgt	660.912.301	5 Kgt	737.006.781	5 Kgt	760.593.899	5 Kgt	772.273.949	5 Kgt	782.824.768
2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG												
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	30.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	55.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.02.2.01.0010 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota												
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	N/A	2 Kbjkn	580.912.301	2 Kbjkn	637.006.781	2 Kbjkn	650.593.899	2 Kbjkn	662.273.949	2 Kbjkn	662.824.768
2.08.02.2.01.0012 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	2 Lap	50.000.000	2 Lap	60.000.000	2 Lap	60.000.000	2 Lap	60.000.000	2 Lap	65.000.000
2.08.02.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	N/A	8 Kgt	270.000.000	8 Kgt	290.000.000	8 Kgt	300.000.000	8 Kgt	300.000.000	8 Kgt	307.000.000
2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	N/A	100 Org	210.000.000	100 Org	220.000.000	100 Org	230.000.000	100 Org	230.000.000	100 Org	232.000.000
2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	N/A	100 Org	60.000.000	100 Org	70.000.000	100 Org	70.000.000	100 Org	70.000.000	100 Org	75.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.02.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Bertambahnya lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	N/A	29 Lbg	450.000.000	29 Lbg	500.000.000	29 Lbg	530.000.000	29 Lbg	530.000.000	29 Lbg	540.000.000
2.08.02.2.03.0007 Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	N/A	24 Lbg	450.000.000	24 Lbg	500.000.000	24 Lbg	530.000.000	24 Lbg	530.000.000	24 Lbg	540.000.000
2.08.03 Program Perlindungan Perempuan												
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	0,03%	0,039	1.350.895.506	0,039	1.493.814.340	0,038	1.556.019.269	0,037	1.567.445.431	0,036	1.594.397.379
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	N/A	6 Kgt	300.000.000	6 Kgt	330.000.000	6 Kgt	346.500.000	6 Kgt	350.000.000	6 Kgt	350.000.000
2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten /Kota												
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	N/A	16 Lbg	300.000.000	20 Lbg	330.000.000	24 Lbg	346.500.000	28 Lbg	350.000.000	32 Lbg	350.000.000
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota												
Bertambahnya layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	N/A	260 Lynan	650.895.506	259 Lynan	693.814.340	258 Lynan	704.519.269	257 Lynan	712.445.431	256 Lynan	734.397.379
2.08.03.2.02.0003 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
2.08.03.2.02.0004 Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
2.08.03.2.02.0005 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	240 Orang	150.000.000	240 Orang	150.000.000	240 Orang	150.000.000	240 Orang	150.000.000	240 Orang	150.000.000
2.08.03.2.02.0006 Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	20 Orang	80.000.000	20 Orang	80.000.000	20 Orang	80.000.000	20 Orang	80.000.000	20 Orang	80.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.03.2.02.0007 Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	100 Orang	70.000.000	100 Orang	70.000.000	100 Orang	70.000.000	100 Orang	70.000.000	100 Orang	70.000.000
2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000	100 Orang	80.000.000
2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	200 Orang	170.895.506	200 Orang	213.814.340	200 Orang	224.519.269	200 Orang	232.445.431	200 Orang	254.397.379
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	N/A	4 Kgt	400.000.000	4 Kgt	470.000.000	4 Kgt	505.000.000	4 Kgt	505.000.000	4 Kgt	510.000.000
Meningkatnya kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan	N/A	4 Kgt		4 Kgt		4 Kgt		4 Kgt		4 Kgt	
2.08.03.2.03.0007 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	N/A	20 Lbg	200.000.000	20 Lbg	250.000.000	20 Lbg	250.000.000	20 Lbg	250.000.000	20 Lbg	250.000.000
2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	N/A	120 Orang	200.000.000	120 Orang	220.000.000	120 Orang	255.000.000	120 Orang	255.000.000	120 Orang	260.000.000
2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga												
Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	100%	100%	557.213.881	100%	616.164.672	100%	641.822.800	100%	646.535.833	100%	657.652.903
	Presentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	1,13%	4,52%		9,04%		13,56%		18,08%		22,6%	
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak	N/A	2 Kgt	242.213.881	2 Kgt	286.164.672	3 Kgt	286.822.800	3 Kgt	291.535.833	4 Kgt	302.652.903
2.08.04.2.01.0007 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	2 Dok	242.213.881	2 Dok	286.164.672	3 Dok	286.822.800	3 Dok	291.535.833	4 Dok	302.652.903

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Bertambahnya layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	N/A	100 Lyanan	315.000.000	105 Lyanan	330.000.000	107 Lyanan	355.000.000	110 Lyanan	355.000.000	115 Lyanan	355.000.000
2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota												
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	N/A	25 Orang	50.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	55.000.000
2.08.04.2.03.0004 Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota												
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	N/A	100 Orang	100.000.000	105 Orang	100.000.000	107 Orang	110.000.000	110 Orang	110.000.000	115 Orang	110.000.000
2.08.04.2.03.0005 Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota												
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	N/A	100 Orang	80.000.000	105 Orang	80.000.000	107 Orang	90.000.000	110 Orang	90.000.000	115 Orang	90.000.000
2.08.04.2.03.0006 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	N/A	150 Orang	85.000.000	155 Orang	100.000.000	160 Orang	100.000.000	165 Orang	100.000.000	170 Orang	100.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak												
Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem data gender dan anak yang akuntabel	Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	50%	50%	283.610.935	52%	313.615.731	54%	326.675.215	57%	329.074.056	60%	334.732.427
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan untuk penyajian data gender dan anak	Jumlah kegiatan penyajian data gender dan anak	2 Kgt	4 Kgt	283.610.935	4 Kgt	313.615.731	4 Kgt	326.675.215	4 Kgt	329.074.056	4 Kgt	334.732.427
2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota												
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	N/A	4 Dok	183.610.935	4 Dok	203.615.731	4 Dok	211.675.215	4 Dok	214.074.056	4 Dok	214.732.427
2.08.05.2.01.0004 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak												
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	N/A	15 SH	100.000.000	15 SH	110.000.000	15 SH	115.000.000	15 SH	115.000.000	15 SH	120.000.000
2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)												
Meningkatnya akses pemenuhan hak-hak anak	Nilai Pemenuhan Hak Anak	69,29	66,34	1.012.733.443	66,34	1.119.876.211	66,36	1.166.509.730	66,38	1.175.075.645	66,38	1.195.280.865
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	N/A	7 Kgt	500.000.000	7 Kgt	560.000.000	7 Kgt	590.000.000	7 Kgt	595.075.645	7 Kgt	615.280.865

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	250 Lbg	250.000.000	250 Lbg	260.000.000	250 Lbg	270.000.000	250 Lbg	270.000.000	250 Lbg	270.000.000
2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	3 Dok	250.000.000	3 Dok	300.000.000	3 Dok	320.000.000	3 Dok	325.075.645	3 Dok	345.280.865
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	N/A	6 Kgt	512.733.443	6 Kgt	559.876.211	6 Kgt	576.509.730	6 Kgt	580.000.000	6 Kgt	580.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	N/A	60 Orang	80.000.000	60 Orang	90.000.000	60 Orang	90.000.000	60 Orang	90.000.000	60 Orang	90.000.000
2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	N/A	5 Lbg	35.000.000	5 Lbg	40.000.000	5 Lbg	40.000.000	5 Lbg	40.000.000	5 Lbg	40.000.000
2.08.06.2.02.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	3 Dok	120.000.000	3 Dok	130.000.000	3 Dok	130.000.000	3 Dok	130.000.000	3 Dok	130.000.000
2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	N/A	2 Lbg	277.733.443	2 Lbg	299.876.211	2 Lbg	316.509.730	2 Lbg	320.000.000	2 Lbg	320.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak												
Menurunnya kekerasan terhadap anak	Nilai Perlindungan Khusus Anak	83,86	89,76	341.461.951	89,76	377.587.131	89,78	393.310.491	89,8	396.198.649	89,8	403.011.215
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	N/A	6 Kgt	71.461.951	6 Kgt	107.587.131	6 Kgt	123.310.491	6 Kgt	126.198.649	6 Kgt	133.011.215
2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	N/A	6 Lbg	71.461.951	6 Lbg	107.587.131	6 Lbg	123.310.491	6 Lbg	126.198.649	6 Lbg	133.011.215
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Bertambahnya layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	120 Lyanan	120.000.000	118 Lyanan	120.000.000	115 Lyanan	120.000.000	113 Lyanan	120.000.000	110 Lyanan	120.000.000
2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000
2.08.07.2.02.0009 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi	N/A	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota											
2.08.07.2.02.0010 Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000
2.08.07.2.02.0011 Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000
2.08.07.2.02.0012 Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000	5 Orang	15.000.000
2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000
2.08.07.2.02.0014 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	2 Kgt	150.000.000	2 Kgt	150.000.000	2 Kgt	150.000.000	2 Kgt	150.000.000	2 Kgt	150.000.000
Meningkatnya kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	1 Kgt		1 Kgt		1 Kgt		2 Kgt		2 Kgt	
2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota												
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	N/A	3 Dok	100.000.000	3 Dok	100.000.000	3 Dok	100.000.000	3 Dok	100.000.000	3 Dok	100.000.000
2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota												
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	N/A	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat			3.687.533.916		4.077.658.871		4.247.459.411		4.278.649.357		4.352.219.981	
2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa												
Meningkatnya kualitas proses administrasi kelurahan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas	100%	100%	744.736.278	100%	823.526.118	100%	857.819.124	100%	864.118.261	100%	878.976.623
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												
Meningkatnya kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	N/A	5 Kgt	794.736.278	5 Kgt	823.526.118	5 Kgt	857.819.124	5 Kgt	864.118.261	5 Kgt	878.976.623
2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa												
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	N/A	1 Dok	44.736.278	1 Dok	50.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	63.000.000
2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa												
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	N/A	1 Dok	50.000.000	1 Dok	55.000.000	1 Dok	55.000.000	1 Dok	55.000.000	1 Dok	58.000.000
2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa												
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	N/A	177 Orang	200.000.000	177 Orang	200.000.000	177 Orang	210.000.000	177 Orang	210.000.000	177 Orang	215.000.000
2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa												
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dok	1 Dok	100.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	112.000.000
2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dok	2 Dok	400.000.000	2 Dok	408.526.118	2 Dok	422.819.124	2 Dok	429.118.261	2 Dok	430.976.623
2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat												
Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	2.942.797.638	100%	3.254.132.753	100%	3.389.640.287	100%	3.414.531.096	100%	3.473.243.358
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Meningkatnya kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	150 Orang	2.942.797.638	150 Orang	3.254.132.753	150 Orang	3.389.640.287	150 Orang	3.414.531.096	150 Orang	3.473.243.358
Meningkatnya kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat	N/A	2 Kgt		2 Kgt		2 Kgt		2 Kgt		2 Kgt	
2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dok	2 Dok	250.000.000	2 Dok	300.000.000	2 Dok	320.000.000	2 Dok	325.000.000	2 Dok	325.000.000
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM,dan Karang												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lbg	2 Lbg	250.000.000	2 Lbg	250.000.000	2 Lbg	300.000.000	2 Lbg	310.000.000	2 Lbg	310.000.000
2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa												
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	N/A	6 Dok	600.000.000	6 Dok	700.000.000	6 Dok	750.000.000	6 Dok	755.000.000	6 Dok	755.000.000
2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna												
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dok	2 Dok	150.000.000	2 Dok	200.000.000	2 Dok	200.000.000	2 Dok	200.000.000	2 Dok	200.000.000
2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat												
Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 Dok	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	110.000.000
2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga												
Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	30 Dok	1.592.797.638	31 Dok	1.704.132.753	32 Dok	1.709.640.287	33 Dok	1.714.531.096	34 Dok	1.773.243.358

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
 yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,135	0,13	0,125	0,12	0,115	0,11	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	78,71	78,71	78,71	78,72	78,72	78,72	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,37	71,38	71,39	71,40	71,41	71,42	
1	Nilai Keselarasan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota yang Mendukung Pembangunan	Angka	4,20	4,20	4,33	4,53	4,60	4,65	
2	Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	Angka	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Angka	68,75	69,2	69,5	69,7	69,9	70	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Angka	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Angka	36	35,9	35,8	35,7	35,6	35,5	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Angka	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	78,71	78,71	78,71	78,71	78,72	78,72	
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,37	71,38	71,39	71,40	71,41	71,42	
7	Rasio KDRT	Angka	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase LPM aktif	Angka	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2025-2029. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Oleh karena itu, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**